



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

TA . 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop.

Airlangga Hartarto



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%
		1.2	Biaya Logistik	13,52% terhadap PDB
		1.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,4% terhadap PDB
		1.4	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%
		1.5	Devisa Pariwisata	19,00 – 22,10 miliar USD
		1.6	Rasio PDB Pariwisata	4,5% - 4,6%
		1.7	Indeks Ketahanan Energi	6,77
		1.8	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43
2.	Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi	2.1	Tingkat Inflasi	(2,5 ± 1)%
3.	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan	3.1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%
		3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% - 5%
4.	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
6.	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas	6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	90,77



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 165.935.416.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 293.830.838.000
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rp 459.766.254.000

Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah

Jakarta, Januari 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

MANUAL IKU

TA . 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.1

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth							
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan							
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.1. Pertumbuhan Ekonomi							
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td>Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau overlapping. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.</td></tr><tr><td>Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.</td></tr><tr><td>Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.</td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td>Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:<div>$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{\text{PDB/PDRB tahun ini} - \text{PDB/PDRB tahun lalu}}{\text{PDB/PDRB tahun lalu}} \right) \times 100\%$</div>Keterangan: Gt = Pertumbuhan ekonomi periode t (year on year) PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB(t-1) = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya t-1 (berdasarkan harga konstan)</td></tr><tr><td>Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional riil yang diperoleh negara pada periode</td></tr></table>	Definisi	Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau overlapping. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.	Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.	Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.	Formula	Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: <div>$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{\text{PDB/PDRB tahun ini} - \text{PDB/PDRB tahun lalu}}{\text{PDB/PDRB tahun lalu}} \right) \times 100\%$</div> Keterangan: Gt = Pertumbuhan ekonomi periode t (year on year) PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB(t-1) = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya t-1 (berdasarkan harga konstan)	Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional riil yang diperoleh negara pada periode
Definisi									
Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau overlapping. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.									
Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.									
Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.									
Formula									
Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: <div>$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{\text{PDB/PDRB tahun ini} - \text{PDB/PDRB tahun lalu}}{\text{PDB/PDRB tahun lalu}} \right) \times 100\%$</div> Keterangan: Gt = Pertumbuhan ekonomi periode t (year on year) PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB(t-1) = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya t-1 (berdasarkan harga konstan)									
Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional riil yang diperoleh negara pada periode									

tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu. Pengukuran realisasi kinerja IKU Pertumbuhan Ekonomi didasarkan pada perbandingan pertumbuhan ekonomi yang dihitung (realisasi) dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dikalikan 100%.
Tujuan
Untuk mengetahui besaran pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan yang merupakan indikator perwujudan dari perekonomian Indonesia yang unggul. Besaran pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan berjalan akan dijalankan sebagai basis data untuk membuat kebijakan perekonomian yang berkualitas.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: (...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	5,3%	5,3%
s.d. Triwulan I	5,3%	-
s.d. Triwulan II	5,3%	-
s.d. Triwulan III	5,3%	-
s.d. Triwulan IV	5,3%	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.2

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth							
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan							
Deskripsi Sasaran Strategis	:	<p>Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).</p>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.2. Biaya Logistik							
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.</p><p>Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu:</p><div><div>1.</div><div>Biaya Transportasi</div></div><div><div>2.</div><div>Biaya Pergudangan</div></div><div><div>3.</div><div>Biaya Penyimpnana Persediaan (Inventory)</div></div><div><div>4.</div><div>Biaya Administrasi</div></div><p>Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global.</p><p>Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik.</p></td></tr><tr><td colspan="3"><table><tr><th>Formula</th></tr><tr><td><p>Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut:</p><div><div>Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) =</div><div><div><div>Total Biaya Logistik Nasional</div><div>Produk Domestik Bruto (PDB)</div></div><div>× 100%</div></div></div><p>dimana:</p><div><div><div>•</div><div>Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik.</div></div><div><div>•</div><div>PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).</div></div></div></td></tr></table></td></tr></table>	Definisi	<p>Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.</p> <p>Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu:</p> <div><div>1.</div><div>Biaya Transportasi</div></div> <div><div>2.</div><div>Biaya Pergudangan</div></div> <div><div>3.</div><div>Biaya Penyimpnana Persediaan (Inventory)</div></div> <div><div>4.</div><div>Biaya Administrasi</div></div> <p>Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global.</p> <p>Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik.</p>	<table><tr><th>Formula</th></tr><tr><td><p>Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut:</p><div><div>Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) =</div><div><div><div>Total Biaya Logistik Nasional</div><div>Produk Domestik Bruto (PDB)</div></div><div>× 100%</div></div></div><p>dimana:</p><div><div><div>•</div><div>Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik.</div></div><div><div>•</div><div>PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).</div></div></div></td></tr></table>			Formula	<p>Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut:</p> <div><div>Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) =</div><div><div><div>Total Biaya Logistik Nasional</div><div>Produk Domestik Bruto (PDB)</div></div><div>× 100%</div></div></div> <p>dimana:</p> <div><div><div>•</div><div>Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik.</div></div><div><div>•</div><div>PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).</div></div></div>
Definisi									
<p>Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.</p> <p>Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu:</p> <div><div>1.</div><div>Biaya Transportasi</div></div> <div><div>2.</div><div>Biaya Pergudangan</div></div> <div><div>3.</div><div>Biaya Penyimpnana Persediaan (Inventory)</div></div> <div><div>4.</div><div>Biaya Administrasi</div></div> <p>Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global.</p> <p>Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik.</p>									
<table><tr><th>Formula</th></tr><tr><td><p>Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut:</p><div><div>Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) =</div><div><div><div>Total Biaya Logistik Nasional</div><div>Produk Domestik Bruto (PDB)</div></div><div>× 100%</div></div></div><p>dimana:</p><div><div><div>•</div><div>Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik.</div></div><div><div>•</div><div>PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).</div></div></div></td></tr></table>			Formula	<p>Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut:</p> <div><div>Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) =</div><div><div><div>Total Biaya Logistik Nasional</div><div>Produk Domestik Bruto (PDB)</div></div><div>× 100%</div></div></div> <p>dimana:</p> <div><div><div>•</div><div>Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik.</div></div><div><div>•</div><div>PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).</div></div></div>					
Formula									
<p>Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut:</p> <div><div>Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) =</div><div><div><div>Total Biaya Logistik Nasional</div><div>Produk Domestik Bruto (PDB)</div></div><div>× 100%</div></div></div> <p>dimana:</p> <div><div><div>•</div><div>Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik.</div></div><div><div>•</div><div>PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).</div></div></div>									

<ul style="list-style-type: none"> Satuan Hasil Persentase (%) — menunjukkan seberapa besar proporsi biaya logistik terhadap total ekonomi nasional. <p>Secara khusus, Perhitungan Rasio Biaya Logistik terhadap PDB dikeluarkan melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara tahunan.</p>
Tujuan Pengukuran Rasio Biaya Logistik terhadap PDB bertujuan untuk menunjukkan berapa besar proporsi biaya logistik terhadap total output ekonomi nasional. Semakin rendah rasionya, semakin efisien sistem logistik suatu negara atau wilayah.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Perniagaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Disagresi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Stok Kapital
Tingkat Kendali IKU	<div> <div>(...) High</div> <div>(...) Moderate</div> <div>(X) Low</div> </div>
Tingkat Validitas IKU	<div> <div>(X) Exact</div> <div>(...) Proxy</div> <div>(...) Activity</div> </div>
Jenis Konsolidasi Periode	<div> <div>(...) Sum</div> <div>(...) Average</div> <div>(X) Take Last Known Value</div> </div>
Jenis Cascading IKU	<div> <div>(X) Cascading Peta</div> <div>(...) Cascading Non Peta</div> <div>(...) Non-Cascading</div> </div>
Metode Cascading	<div> <div>(X) Direct</div> <div>(...) Indirect</div> </div>
Polarisasi IKU	<div> <div>(X) Maximize</div> <div>(...) Minimize</div> <div>(...) Stabilize</div> </div>
Periode Pelaporan	<div> <div>(...) Bulanan</div> <div>(...) Triwulanan</div> <div>(...) Semesteran</div> <div>(X) Tahunan</div> </div>

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	13,52% terhadap PDB	13,52% terhadap PDB
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.3

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth		
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan		
Deskripsi Sasaran Strategis	:	<p>Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).</p>		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto		
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi.</p><p>Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu:</p><ol style="list-style-type: none">1. Bangunan Tempat Tinggal2. Bangunan bukan tempat tinggal3. Konstruksi lainnya4. Mesin pembangkit dan penggerak mula5. Peralatan informasi dan teleokomunikasi6. Mesin lainnya7. Pesawat terbang dan sejenisnya8. Kapal dan sejenisnya9. Kereta api dan sejenisnya10. Kendaraan bermotor11. Alat pengangkut lainnya12. Ternak besar13. Hewan lainnya14. Tanaman perkebunan15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya16. Tanaman lainnya17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu18. Peralatan dari logam19. Barang dari kain & kulit20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur21. Peralatan kedokteran dan kesehatan22. Peralatan lainnya23. Produk kekayaan intelektual24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi<p>Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain:</p><ul style="list-style-type: none">• Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.• Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.</td></tr></table>	Definisi	<p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi.</p> <p>Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bangunan Tempat Tinggal2. Bangunan bukan tempat tinggal3. Konstruksi lainnya4. Mesin pembangkit dan penggerak mula5. Peralatan informasi dan teleokomunikasi6. Mesin lainnya7. Pesawat terbang dan sejenisnya8. Kapal dan sejenisnya9. Kereta api dan sejenisnya10. Kendaraan bermotor11. Alat pengangkut lainnya12. Ternak besar13. Hewan lainnya14. Tanaman perkebunan15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya16. Tanaman lainnya17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu18. Peralatan dari logam19. Barang dari kain & kulit20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur21. Peralatan kedokteran dan kesehatan22. Peralatan lainnya23. Produk kekayaan intelektual24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi <p>Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.• Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.
Definisi				
<p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi.</p> <p>Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bangunan Tempat Tinggal2. Bangunan bukan tempat tinggal3. Konstruksi lainnya4. Mesin pembangkit dan penggerak mula5. Peralatan informasi dan teleokomunikasi6. Mesin lainnya7. Pesawat terbang dan sejenisnya8. Kapal dan sejenisnya9. Kereta api dan sejenisnya10. Kendaraan bermotor11. Alat pengangkut lainnya12. Ternak besar13. Hewan lainnya14. Tanaman perkebunan15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya16. Tanaman lainnya17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu18. Peralatan dari logam19. Barang dari kain & kulit20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur21. Peralatan kedokteran dan kesehatan22. Peralatan lainnya23. Produk kekayaan intelektual24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi <p>Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.• Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.				

- Berguna sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis bagi pihak swasta, karena memberikan informasi tentang posisi dan kondisi perekonomian suatu wilayah Negara dan menjadi perkiraan dalam menentukan nilai investasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi nilai Pembentukan Modal Tetap Buro (PMTB)

Formula

$$\text{Rasio PMTB terhadap PDB (\%)} = \left(\frac{\text{Nilai PMTB}}{\text{PDB atas dasar harga berlaku}} \right) \times 100\%$$

dimana:

- PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto): nilai investasi untuk aset tetap baru (bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, kendaraan, dll.) dalam suatu periode
- PDB (Produk Domestik Bruto): Total nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode yang sama, atas dasar harga berlaku

Perhitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana BPS selalu mengeluarkan data PDB dan PDRB yang dihitung dari 2 sisi yaitu produksi dan pengeluaran, sementara itu PMTB merupakan salah satu data komponen PDRB Pengeluaran.

Tujuan

Mengukur PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui tingkat investasi dalam aset tetap produktif dalam suatu perekonomian dan sejauh mana investasi tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio ini merupakan salah satu indikator kunci dalam analisis makroekonomi dan perencanaan pembangunan.

Satuan Pengukuran

Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Sumber Data

Berita Resmi Statistik Disagresi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Stok Kapital

Tingkat Kendali IKU

: (...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	29,4% PDB	29,4% PDB
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.4

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis		<p>Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.4. Rasio PDB Industri Pengolahan
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <p>Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Badan Pusat Statistik adalah ukuran ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kinerja atau performa pembangunan, khususnya di bidang ekonomi makro. PDB merupakan ukuran ekonomi makro yang menggambarkan nilai total output akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. PDB digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.</p> <p>Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan (<i>Manufacturing GDP</i>) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu (biasanya per tahun atau triwulan). Industri Pengolahan ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Sektor Industri Pengolahan di Indonesia menjadi salah satu penggerak utama ekonomi sehingga industri ini mampu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas relatif tinggi.</p> <p>Rasio PDB Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana sektor industri pengolahan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.</p> <p>Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Rasio PDB Industri Pengolahan merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Rasio PDB Industri Pengolahan.</p> <p>Formula</p> <p>Rasio PDB Industri Pengolahan dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:</p> $\text{Rasio PDB Industri Pengolahan} = \left(\frac{\text{PDB Industri Pengolahan}}{\text{Total PDB}} \right) \times 100\%$ <p>Pengukuran realisasi kinerja IKU Rasio PDB Indonesia didasarkan pada perbandingan total PDB Industri Pengolahan dengan Total PDB secara keseluruhan dan hasilnya dikalikan 100%. Jika Rasio PDB Industri Pengolahan mengalami kenaikan maka kontribusi Industri Pengolahan terhadap total PDB semakin besar. Sebaliknya jika Rasio PDB Industri Pengolahan menurun maka kontribusi Industri Pengolahan terhadap total PDB menurun.</p>

Tujuan
Mengukur rasio PDB Industri Pengolahan bertujuan untuk mengetahui kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau daerah. Rasio ini penting untuk memahami peran dan bobot sektor manufaktur dalam struktur ekonomi secara keseluruhan.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: (...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	20,8% PDB	20,8% PDB
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.5

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis	:	<p>Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.5. Devisa Pariwisata
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <p>Devisa Pariwisata adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa negara, khususnya melalui pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama kunjungan mereka ke Indonesia dalam periode tertentu. Devisa pariwisata merupakan salah satu indikator strategis dalam menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Secara sederhana, devisa pariwisata menggambarkan besarnya pemasukan negara dari pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berkunjung ke Indonesia. Adapun sumber utama pembentuk devisa pariwisata sebagai berikut:</p> <p>1. Akomodasi</p> <p>Pengeluaran wisatawan untuk penginapan adalah salah satu kontributor terbesar devisa pariwisata. Hal ini mencakup pembayaran hotel, vila, resort, guesthouse, hingga homestay. Tingginya permintaan terhadap akomodasi berkualitas mendorong pengembangan industri perhotelan dan membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.</p> <p>2. Makanan dan Minuman (Kuliner)</p> <p>Kuliner Indonesia yang kaya cita rasa turut menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Dari restoran berbintang hingga warung kaki lima, pengeluaran wisatawan pada sektor makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa, sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.</p> <p>3. Transportasi Lokal</p> <p>Setelah tiba di Indonesia, wisatawan membutuhkan transportasi untuk menjelajahi destinasi wisata. Belanja devisa pada sektor ini mencakup sewa kendaraan, tiket pesawat domestik, angkutan umum, kapal wisata, hingga jasa pemandu. Kualitas dan keterjangkauan moda transportasi mempengaruhi kenyamanan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pengeluaran mereka.</p> <p>4. Belanja dan Oleh-oleh</p> <p>Kegiatan berbelanja menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Wisatawan biasanya membeli cendera mata, produk kerajinan tangan, pakaian, perhiasan, atau produk khas daerah lainnya. Pengeluaran ini menjadi ladang penghasilan bagi UMKM lokal, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah tujuan wisata.</p> <p>5. Atraksi dan Rekreasi</p> <p>Wisatawan juga mengeluarkan uang untuk menikmati berbagai atraksi wisata, seperti tiket masuk objek wisata, pertunjukan budaya, taman hiburan, paket wisata bahari, dan kegiatan petualangan alam. Semakin banyak pilihan atraksi berkualitas, maka semakin besar peluang devisa yang dihasilkan.</p> <p>6. Jasa Lainnya</p> <p>Komponen ini mencakup berbagai layanan pendukung seperti jasa tur dan travel, fotografi profesional, spa dan wellness, komunikasi, dan layanan pribadi lainnya. Walaupun porsi tidak sebesar komponen utama lainnya, jasa ini turut memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memberikan kontribusi tambahan terhadap devisa.</p>

Dalam perumusannya, IKU ini terdiri dari dua komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. Angka ini mencerminkan volume wisatawan yang berhasil ditarik oleh daya tarik destinasi, promosi internasional, serta kemudahan akses masuk ke Indonesia. Komponen kedua adalah rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka. Pengeluaran ini mencakup berbagai aktivitas seperti akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi lokal, rekreasi, belanja oleh-oleh, serta jasa lainnya. Kombinasi dari kedua komponen tersebut—jumlah wisatawan dan besarnya pengeluaran mereka—menghasilkan nilai devisa pariwisata yang digunakan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan sektor pariwisata nasional. IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja kementerian terkait, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan ekonomi nasional serta pembentukan kebijakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Formula
<p>Devisa Pariwisata = Jumlah Wisman × Rata – rata Pengeluaran per Wisman per Kunjungan</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Wisman: jumlah kunjungan wisatawan mancanegara • Rata-rata Pengeluaran: pengeluaran rata-rata per kunjungan, termasuk akomodasi, makanan, transportasi, rekreasi, dll. • Satuan devisa umumnya dalam juta atau miliar USD
Tujuan
Tujuan mengukur devisa pariwisata Indonesia adalah untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, terutama dari sisi pendapatan valuta asing (mata uang asing) yang masuk ke negara

Satuan Pengukuran	Miliar USD (Nominal Mata Uang)
Unit/Pihak Penyedia Data	Bank Indonesia
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Bank Indonesia
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(...) Maximize (....) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	19 – 22,1 miliar USD	19 – 22,1 miliar USD
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.6

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth				
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan				
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.6 Rasio PDB Pariwisata				
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil.</p><p>IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata.</p><p>Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti:</p><div><div>a.</div><div>Akomodasi</div></div><div><div>b.</div><div>Makanan dan minuman</div></div><div><div>c.</div><div>Transportasi</div></div><div><div>d.</div><div>Agen perjalanan dan tour operator</div></div><div><div>e.</div><div>Aktivitas budaya dan rekreasi</div></div><div><div>f.</div><div>Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata</div></div><p>Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.</p></td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td><div><div><div></div><div>Rasio PDB Pariwisata = $\left(\frac{\text{PDB Sektor Pariwisata}}{\text{PDB Nasional}}\right) \times 100\%$</div></div><div>Dimana:</div><div><div><div>•</div><div>PDB Sektor Pariwisata: nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung terkait dengan industri pariwisata. Nilai ini dihitung berdasarkan pendekatan Tourism Satellite Account (TSA) dan mencakup berbagai subsektor seperti: Akomodasi (hotel, penginapan); Makanan dan minuman; Transportasi wisata (darat, laut, udara); Agen perjalanan dan tour operator; Jasa hiburan dan rekreasi; Industri kerajinan dan souvenir terkait pariwisata</div></div><div><div>•</div><div>PDB Nasional: total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (biasanya tahunan), termasuk sektor industri, pertanian, jasa, perdagangan, konstruksi, dan lainnya.</div></div></div></div></td></tr></table>	Definisi	<p>Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil.</p> <p>IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata.</p> <p>Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti:</p> <div><div>a.</div><div>Akomodasi</div></div> <div><div>b.</div><div>Makanan dan minuman</div></div> <div><div>c.</div><div>Transportasi</div></div> <div><div>d.</div><div>Agen perjalanan dan tour operator</div></div> <div><div>e.</div><div>Aktivitas budaya dan rekreasi</div></div> <div><div>f.</div><div>Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata</div></div> <p>Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.</p>	Formula	<div><div><div></div><div>Rasio PDB Pariwisata = $\left(\frac{\text{PDB Sektor Pariwisata}}{\text{PDB Nasional}}\right) \times 100\%$</div></div><div>Dimana:</div><div><div><div>•</div><div>PDB Sektor Pariwisata: nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung terkait dengan industri pariwisata. Nilai ini dihitung berdasarkan pendekatan Tourism Satellite Account (TSA) dan mencakup berbagai subsektor seperti: Akomodasi (hotel, penginapan); Makanan dan minuman; Transportasi wisata (darat, laut, udara); Agen perjalanan dan tour operator; Jasa hiburan dan rekreasi; Industri kerajinan dan souvenir terkait pariwisata</div></div><div><div>•</div><div>PDB Nasional: total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (biasanya tahunan), termasuk sektor industri, pertanian, jasa, perdagangan, konstruksi, dan lainnya.</div></div></div></div>
Definisi						
<p>Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil.</p> <p>IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata.</p> <p>Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti:</p> <div><div>a.</div><div>Akomodasi</div></div> <div><div>b.</div><div>Makanan dan minuman</div></div> <div><div>c.</div><div>Transportasi</div></div> <div><div>d.</div><div>Agen perjalanan dan tour operator</div></div> <div><div>e.</div><div>Aktivitas budaya dan rekreasi</div></div> <div><div>f.</div><div>Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata</div></div> <p>Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.</p>						
Formula						
<div><div><div></div><div>Rasio PDB Pariwisata = $\left(\frac{\text{PDB Sektor Pariwisata}}{\text{PDB Nasional}}\right) \times 100\%$</div></div><div>Dimana:</div><div><div><div>•</div><div>PDB Sektor Pariwisata: nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung terkait dengan industri pariwisata. Nilai ini dihitung berdasarkan pendekatan Tourism Satellite Account (TSA) dan mencakup berbagai subsektor seperti: Akomodasi (hotel, penginapan); Makanan dan minuman; Transportasi wisata (darat, laut, udara); Agen perjalanan dan tour operator; Jasa hiburan dan rekreasi; Industri kerajinan dan souvenir terkait pariwisata</div></div><div><div>•</div><div>PDB Nasional: total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (biasanya tahunan), termasuk sektor industri, pertanian, jasa, perdagangan, konstruksi, dan lainnya.</div></div></div></div>						

Rasio PDB pariwisata juga digunakan untuk **membandingkan daya saing antar negara dalam sektor pariwisata**. Negara dengan kontribusi pariwisata tinggi terhadap PDB biasanya dianggap memiliki ekosistem pariwisata yang sehat dan produktif, serta mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan penerimaan devisa.

Tujuan

Mengukur rasio PDB pariwisata atau kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pariwisata berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Salah satu tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif atas kontribusi ekonomi sektor pariwisata, yang meliputi industri jasa akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, hiburan, serta jasa-jasa terkait lainnya. Dengan memahami kontribusi pariwisata terhadap PDB, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, serta menentukan prioritas investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor ini.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Sumber Data

Laporan Bulanan BPS, Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata, Neraca Satelit Pariwisata Nasional

Tingkat Kendali IKU

: (...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(...) Maximize (....) Minimize (X) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	4,5 – 4,6 %	4,5 – 4,6 %
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.7

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth				
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan				
Deskripsi Sasaran Strategis	:	<p>Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).</p>				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.7. Indeks Ketahanan Energi				
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Indeks Ketahanan Energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata, guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.</p><p>Indeks ini merepresentasikan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi (availability), aksesibilitas dan keterjangkauan (accessibility and affordability), ketergantungan energi terhadap luar negeri (security), efisiensi dan keberlanjutan lingkungan (sustainability), serta diversifikasi sumber energi.</p><ol style="list-style-type: none">1. Availability (Ketersediaan): menilai sejauh mana cadangan dan pasokan energi (primer dan final) cukup untuk kebutuhan nasional.2. Accessibility: mengukur keterjangkauan infrastruktur dan distribusi energi oleh masyarakat dan industri.3. Affordability (Keterjangkauan Harga): menilai kemampuan masyarakat untuk membeli energi dengan harga yang wajar.4. Security (Ketahanan Pasokan): mengukur ketergantungan terhadap impor energi dan kemampuan menghadapi gangguan eksternal.5. Sustainability & Efficiency: mengukur proporsi energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan energi, dan dampak lingkungan dari sistem energi.6. Diversifikasi Energi: menilai tingkat variasi sumber energi nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber.<p>Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor seperti berikut: memberikan alat ukur yang objektif dan komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional dari sisi teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan; mendukung perumusan kebijakan energi yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi masa depan, termasuk dalam perencanaan transisi energi nasional; memfasilitasi monitoring dan evaluasi program serta investasi energi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna; mengantisipasi risiko dan gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kapasitas respons dan mitigasi melalui diversifikasi dan efisiensi; memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial nasional dengan sistem energi yang handal, adil, dan berkelanjutan; mendorong investasi dan inovasi di sektor energi, dengan memberikan kepastian dan gambaran risiko kepada pelaku usaha.</p></td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td><p>Indeks Ketahanan Energi (Energy Security Index) adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa aman dan andalnya suatu negara atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan energinya. Rumus dan komponen indeks ini bisa bervariasi tergantung pada lembaga atau pendekatan yang digunakan, tapi secara umum mencakup beberapa dimensi utama:</p><ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan energi (Availability)2. Aksesibilitas atau keterjangkauan (Accessibility / Affordability)3. Diversifikasi sumber energi4. Ketahanan terhadap gangguan pasokan (Reliability)5. Dampak lingkungan dan efisiensi (Environmental sustainability & Efficiency)</td></tr></table>	Definisi	<p>Indeks Ketahanan Energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata, guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Indeks ini merepresentasikan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi (availability), aksesibilitas dan keterjangkauan (accessibility and affordability), ketergantungan energi terhadap luar negeri (security), efisiensi dan keberlanjutan lingkungan (sustainability), serta diversifikasi sumber energi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Availability (Ketersediaan): menilai sejauh mana cadangan dan pasokan energi (primer dan final) cukup untuk kebutuhan nasional.2. Accessibility: mengukur keterjangkauan infrastruktur dan distribusi energi oleh masyarakat dan industri.3. Affordability (Keterjangkauan Harga): menilai kemampuan masyarakat untuk membeli energi dengan harga yang wajar.4. Security (Ketahanan Pasokan): mengukur ketergantungan terhadap impor energi dan kemampuan menghadapi gangguan eksternal.5. Sustainability & Efficiency: mengukur proporsi energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan energi, dan dampak lingkungan dari sistem energi.6. Diversifikasi Energi: menilai tingkat variasi sumber energi nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber. <p>Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor seperti berikut: memberikan alat ukur yang objektif dan komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional dari sisi teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan; mendukung perumusan kebijakan energi yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi masa depan, termasuk dalam perencanaan transisi energi nasional; memfasilitasi monitoring dan evaluasi program serta investasi energi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna; mengantisipasi risiko dan gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kapasitas respons dan mitigasi melalui diversifikasi dan efisiensi; memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial nasional dengan sistem energi yang handal, adil, dan berkelanjutan; mendorong investasi dan inovasi di sektor energi, dengan memberikan kepastian dan gambaran risiko kepada pelaku usaha.</p>	Formula	<p>Indeks Ketahanan Energi (Energy Security Index) adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa aman dan andalnya suatu negara atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan energinya. Rumus dan komponen indeks ini bisa bervariasi tergantung pada lembaga atau pendekatan yang digunakan, tapi secara umum mencakup beberapa dimensi utama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan energi (Availability)2. Aksesibilitas atau keterjangkauan (Accessibility / Affordability)3. Diversifikasi sumber energi4. Ketahanan terhadap gangguan pasokan (Reliability)5. Dampak lingkungan dan efisiensi (Environmental sustainability & Efficiency)
Definisi						
<p>Indeks Ketahanan Energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata, guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Indeks ini merepresentasikan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi (availability), aksesibilitas dan keterjangkauan (accessibility and affordability), ketergantungan energi terhadap luar negeri (security), efisiensi dan keberlanjutan lingkungan (sustainability), serta diversifikasi sumber energi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Availability (Ketersediaan): menilai sejauh mana cadangan dan pasokan energi (primer dan final) cukup untuk kebutuhan nasional.2. Accessibility: mengukur keterjangkauan infrastruktur dan distribusi energi oleh masyarakat dan industri.3. Affordability (Keterjangkauan Harga): menilai kemampuan masyarakat untuk membeli energi dengan harga yang wajar.4. Security (Ketahanan Pasokan): mengukur ketergantungan terhadap impor energi dan kemampuan menghadapi gangguan eksternal.5. Sustainability & Efficiency: mengukur proporsi energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan energi, dan dampak lingkungan dari sistem energi.6. Diversifikasi Energi: menilai tingkat variasi sumber energi nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber. <p>Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor seperti berikut: memberikan alat ukur yang objektif dan komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional dari sisi teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan; mendukung perumusan kebijakan energi yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi masa depan, termasuk dalam perencanaan transisi energi nasional; memfasilitasi monitoring dan evaluasi program serta investasi energi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna; mengantisipasi risiko dan gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kapasitas respons dan mitigasi melalui diversifikasi dan efisiensi; memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial nasional dengan sistem energi yang handal, adil, dan berkelanjutan; mendorong investasi dan inovasi di sektor energi, dengan memberikan kepastian dan gambaran risiko kepada pelaku usaha.</p>						
Formula						
<p>Indeks Ketahanan Energi (Energy Security Index) adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa aman dan andalnya suatu negara atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan energinya. Rumus dan komponen indeks ini bisa bervariasi tergantung pada lembaga atau pendekatan yang digunakan, tapi secara umum mencakup beberapa dimensi utama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan energi (Availability)2. Aksesibilitas atau keterjangkauan (Accessibility / Affordability)3. Diversifikasi sumber energi4. Ketahanan terhadap gangguan pasokan (Reliability)5. Dampak lingkungan dan efisiensi (Environmental sustainability & Efficiency)						

$$IKE = w_1 \cdot A + w_2 \cdot B + w_3 \cdot C + w_4 \cdot D + w_5 \cdot E$$

Keterangan:

A = Indeks ketersediaan energi

B = Indeks keterjangkauan energi

C = Indeks diversifikasi energi

D = Indeks keandalan sistem energi

E = Indeks dampak lingkungan energi

W_1, W_2, \dots, W_5 = bobot koefisien masing-masing indeks

Tujuan

Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi untuk mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.

Indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa tangguh sistem energi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan — baik dari sisi pasokan energi, harga, ketergantungan impor, diversifikasi sumber energi, hingga dampak lingkungan.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Dewan Energi Nasional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber Data

Laporan Dewan Energi Nasional

Tingkat Kendali IKU

: (...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

: (...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	6,77	6,77
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.8

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth				
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan				
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.8 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global				
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur.</p><p>Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan.</p><p>Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.</p></td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td><p>Indeks Daya Saing Digital Indonesia dihitung dengan menggabungkan beberapa dimensi atau pilar utama yang menggambarkan berbagai aspek penting dalam kemampuan digital sebuah negara. Setiap pilar ini mewakili satu area kritis, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM) digital, ekosistem inovasi, kebijakan dan regulasi digital, serta tingkat penggunaan teknologi digital.</p><p>Untuk menghitung indeks ini, terlebih dahulu masing-masing pilar diberi skor berdasarkan capaian atau performa yang diukur melalui berbagai indikator turunan. Skor ini biasanya dinyatakan dalam angka yang sudah dinormalisasi agar berada dalam skala yang sama, misalnya dari 0 sampai 100.</p><p>Setelah mendapatkan skor pada setiap pilar, skor tersebut dikalikan dengan bobot atau tingkat kepentingan pilar tersebut dalam keseluruhan indeks. Bobot ini merefleksikan seberapa besar kontribusi pilar tersebut terhadap daya saing digital secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa jumlah semua bobot harus sama dengan 1 (atau 100%). Selanjutnya, hasil perkalian skor dan bobot untuk semua pilar dijumlahkan. Penjumlahan inilah yang menghasilkan nilai akhir dari Indeks Daya Saing Digital. Nilai ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan kemampuan Indonesia dalam kompetisi digital di tingkat global.</p></td></tr></table>	Definisi	<p>IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur.</p> <p>Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.</p>	Formula	<p>Indeks Daya Saing Digital Indonesia dihitung dengan menggabungkan beberapa dimensi atau pilar utama yang menggambarkan berbagai aspek penting dalam kemampuan digital sebuah negara. Setiap pilar ini mewakili satu area kritis, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM) digital, ekosistem inovasi, kebijakan dan regulasi digital, serta tingkat penggunaan teknologi digital.</p> <p>Untuk menghitung indeks ini, terlebih dahulu masing-masing pilar diberi skor berdasarkan capaian atau performa yang diukur melalui berbagai indikator turunan. Skor ini biasanya dinyatakan dalam angka yang sudah dinormalisasi agar berada dalam skala yang sama, misalnya dari 0 sampai 100.</p> <p>Setelah mendapatkan skor pada setiap pilar, skor tersebut dikalikan dengan bobot atau tingkat kepentingan pilar tersebut dalam keseluruhan indeks. Bobot ini merefleksikan seberapa besar kontribusi pilar tersebut terhadap daya saing digital secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa jumlah semua bobot harus sama dengan 1 (atau 100%). Selanjutnya, hasil perkalian skor dan bobot untuk semua pilar dijumlahkan. Penjumlahan inilah yang menghasilkan nilai akhir dari Indeks Daya Saing Digital. Nilai ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan kemampuan Indonesia dalam kompetisi digital di tingkat global.</p>
Definisi						
<p>IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur.</p> <p>Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.</p>						
Formula						
<p>Indeks Daya Saing Digital Indonesia dihitung dengan menggabungkan beberapa dimensi atau pilar utama yang menggambarkan berbagai aspek penting dalam kemampuan digital sebuah negara. Setiap pilar ini mewakili satu area kritis, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM) digital, ekosistem inovasi, kebijakan dan regulasi digital, serta tingkat penggunaan teknologi digital.</p> <p>Untuk menghitung indeks ini, terlebih dahulu masing-masing pilar diberi skor berdasarkan capaian atau performa yang diukur melalui berbagai indikator turunan. Skor ini biasanya dinyatakan dalam angka yang sudah dinormalisasi agar berada dalam skala yang sama, misalnya dari 0 sampai 100.</p> <p>Setelah mendapatkan skor pada setiap pilar, skor tersebut dikalikan dengan bobot atau tingkat kepentingan pilar tersebut dalam keseluruhan indeks. Bobot ini merefleksikan seberapa besar kontribusi pilar tersebut terhadap daya saing digital secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa jumlah semua bobot harus sama dengan 1 (atau 100%). Selanjutnya, hasil perkalian skor dan bobot untuk semua pilar dijumlahkan. Penjumlahan inilah yang menghasilkan nilai akhir dari Indeks Daya Saing Digital. Nilai ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan kemampuan Indonesia dalam kompetisi digital di tingkat global.</p>						

Secara matematis, formula tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Daya Saing Digital (IDD)} = \sum_{i=1}^n w_i \times S_i$$

Penjelasan:

- n = Jumlah pilar atau dimensi pengukuran (misalnya: Infrastruktur Digital, SDM Digital, Ekosistem Inovasi, Regulasi dan Kebijakan, dan Penggunaan Digital)
- Wi = Bobot atau berat masing-masing pilar ke dalam indeks total (dengan jumlah bobot $\sum W_i = 1$ atau 100%)
- Si = Skor atau nilai capaian pada pilar ke-i, biasanya dinilai dari indikator-indikator turunan dengan rentang nilai standar (misal 0-100 atau 0-1)

Tujuan

IKU Indeks Daya Saing Digital ini diukur untuk menilai posisi dan kinerja digital Indonesia di kancah global. Selain itu, pengukuran ini berfungsi dalam memberi gambaran objektif tentang di mana posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain dalam hal kesiapan, kapasitas, dan keberhasilan transformasi digital serta mendorong benchmarking terhadap negara-negara pesaing dan mitra ekonomi, sehingga Indonesia dapat mengidentifikasi gap kompetitif dan peluang strategis.

Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	International Institute for Management Development (IMD), World Economic Forum (WEF)
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	International Institute for Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), World Economic Forum (WEF)
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (..) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	43	43
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.1

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth		
Sasaran Strategis	:	SS 2. Terkendalnya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi		
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terkendalnya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi berarti tercapainya kondisi di mana laju inflasi berada dalam batas yang stabil dan terkendali, sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional yang mencerminkan faktor-faktor fundamental seperti pertumbuhan ekonomi, produksi, permintaan agregat, dan kondisi moneter. Sasaran ini bertujuan menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi sehingga merusak daya beli masyarakat, namun juga tidak terlalu rendah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Adapun kondisi terkendalnya tingkat inflasi nasional tersebut, didukung oleh beberapa unsur kunci. Tingkat Inflasi yang terkendali mengindikasikan bahwa Inflasi berjalan pada level yang dapat diprediksi dan stabil dalam jangka menengah. Kondisi inflasi yang sesuai dengan fundamental ekonomi mencerminkan kondisi ekonomi nyata, seperti kapasitas produksi, konsumsi, dan suplai uang dalam rangka menjaga daya beli dan mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.2.1. Tingkat Inflasi		
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi <i>supply</i>, sisi demand, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan rill masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan.</p><p>Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasayarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.</p><p>Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbaganya inflasi di kisaran antara lain:</p><div><div>A.</div><div>B.</div><div>C.</div></div><p>Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah</p><p>Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan</p><p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.</p><p>Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut:</p><div><div>(1)</div><div>(2)</div><div>(3)</div></div><p>Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target</p><p>Cadangan beras pemerintah</p><p>Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana</p></td></tr></table>	Definisi	<p>Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi <i>supply</i>, sisi demand, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan rill masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan.</p> <p>Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasayarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.</p> <p>Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbaganya inflasi di kisaran antara lain:</p> <div><div>A.</div><div>B.</div><div>C.</div></div> <p>Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah</p> <p>Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan</p> <p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.</p> <p>Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut:</p> <div><div>(1)</div><div>(2)</div><div>(3)</div></div> <p>Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target</p> <p>Cadangan beras pemerintah</p> <p>Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana</p>
Definisi				
<p>Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi <i>supply</i>, sisi demand, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan rill masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan.</p> <p>Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasayarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.</p> <p>Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbaganya inflasi di kisaran antara lain:</p> <div><div>A.</div><div>B.</div><div>C.</div></div> <p>Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah</p> <p>Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan</p> <p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.</p> <p>Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut:</p> <div><div>(1)</div><div>(2)</div><div>(3)</div></div> <p>Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target</p> <p>Cadangan beras pemerintah</p> <p>Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana</p>				

Formula
Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang terhubung ke metadata SEKI-IHK di Bank Indonesia. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100.
$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{\text{Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode saat ini} - \text{IHK pada periode sebelumnya}}{\text{IHK pada periode sebelumnya}} \times 100\%$
Dalam pengukuran realisasi kinerja IKU didasarkan pada perbandingan nilai inflasi realisasi dengan nilai inflasi yang ditargetkan. Angka inflasi yang digunakan adalah angka inflasi tahun ke tahun (year on year/ tahun n terhadap tahun n-1).
Tujuan
Mengukur capaian kinerja pengendalian inflasi yang merupakan indikator dari perwujudan perekonomian yang unggul. Keberhasilan pengendalian inflasi akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi inflasi yang dipantau secara berkala menjadi dasar pembuatan kebijakan bagi tim TPIP untuk mengendalikan inflasi nasional sesuai kisaran sasaran yang ditetapkan

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Inflasi
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(...) Maximize (....) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%
s.d. Triwulan I	2,5 ± 1%	-
s.d. Triwulan II	2,5 ± 1%	-
s.d. Triwulan III	2,5 ± 1%	-
s.d. Triwulan IV	2,5 ± 1%	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.1

Perspektif : (X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : SS 3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan

Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan adalah kondisi di mana sistem ekonomi dan pasar tenaga kerja mampu menciptakan peluang kerja yang cukup, layak, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja secara berkelanjutan. Sasaran ini menekankan tidak hanya pada kuantitas pekerjaan yang tersedia, tetapi juga pada kualitas pekerjaan—yakni yang menjamin perlindungan hak pekerja, pendapatan yang memadai, kondisi kerja yang aman, serta prospek jangka panjang yang stabil dan adaptif terhadap perubahan struktural ekonomi. Sasaran strategis ini merujuk pada kondisi di mana kegiatan pembangunan ekonomi nasional dan kebijakan ketenagakerjaan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang tidak hanya tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga memiliki kualitas yang sesuai dengan standar pekerjaan layak (decent work) dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Lapangan kerja yang berkualitas mencakup pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak, menjamin perlindungan tenaga kerja, memberikan kepastian hubungan kerja dan kesempatan pengembangan diri, serta berada dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sementara itu, keberlanjutan mengacu pada kemampuan sistem ketenagakerjaan untuk secara terus-menerus menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja, seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, dan tantangan lingkungan global. Adapun Sasaran Strategis ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU) antara lain: (1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT); (2) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK); (3) Persentase pekerja formal terhadap total pekerja; (4) Tingkat ketidaksesuaian (mismatch) pendidikan dan pekerjaan; (5) Jumlah penciptaan lapangan kerja baru per tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.3.1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Deskripsi IKU

Definisi

Lapangan kerja adalah kesempatan atau tempat bagi seseorang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, baik di sektor formal maupun informal, sesuai dengan keahlian, pendidikan, atau keterampilan yang dimilikinya. Sementara itu, Lapangan kerja formal adalah jenis pekerjaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan umumnya memiliki perlindungan hukum serta hak-hak tenaga kerja yang jelas. Beberapa ciri-ciri lapangan kerja formal: Status hukum jelas; perjanjian kerja tertulis; upah minimum dan jaminan sosial; jam kerja dan cuti diatur; pajak dan iuran dibayarkan.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merupakan persentase peningkatan lapangan kerja formal dibandingkan dengan total peningkatan lapangan kerja (formal dan informal) dalam suatu periode waktu tertentu. Proporsi ini tidak hanya mengukur kuantitas lapangan kerja yang diciptakan, tetapi juga kualitasnya. Penyediaan lapangan kerja yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang tersedia, tetapi juga seberapa banyak dari pekerjaan tersebut yang memenuhi standar formal. Proporsi lapangan kerja formal yang tinggi dapat menciptakan lingkaran positif. Pekerja formal memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Proporsi Lapangan Kerja Formal merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Proporsi Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Proporsi Lapangan Kerja Formal.

Formula

Perhitungan Proporsi Lapangan Kerja Formal dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

$$\text{Proporsi Lapangan Kerja Formal (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah pekerja formal}}{\text{Jumlah total pekerja}} \right) \times 100\%$$

Tujuan
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal adalah indikator yang mengukur seberapa besar bagian dari total lapangan kerja baru yang tercipta dalam periode tertentu berada di sektor formal—yakni sektor dengan status pekerjaan yang diatur secara hukum dan memberikan perlindungan ketenagakerjaan, seperti kontrak kerja, jaminan sosial, dan upah minimum

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: (...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	35%	35%
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.2

Perspektif : (X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : SS 3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan

Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan adalah kondisi di mana sistem ekonomi dan pasar tenaga kerja mampu menciptakan peluang kerja yang cukup, layak, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja secara berkelanjutan. Sasaran ini menekankan tidak hanya pada kuantitas pekerjaan yang tersedia, tetapi juga pada kualitas pekerjaan—yakni yang menjamin perlindungan hak pekerja, pendapatan yang memadai, kondisi kerja yang aman, serta prospek jangka panjang yang stabil dan adaptif terhadap perubahan struktural ekonomi. Sasaran strategis ini merujuk pada kondisi di mana kegiatan pembangunan ekonomi nasional dan kebijakan ketenagakerjaan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang tidak hanya tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga memiliki kualitas yang sesuai dengan standar pekerjaan layak (decent work) dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Lapangan kerja yang berkualitas mencakup pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak, menjamin perlindungan tenaga kerja, memberikan kepastian hubungan kerja dan kesempatan pengembangan diri, serta berada dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sementara itu, keberlanjutan mengacu pada kemampuan sistem ketenagakerjaan untuk secara terus-menerus menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja, seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, dan tantangan lingkungan global. Adapun Sasaran Strategis ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU) antara lain: (1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT); (2) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK); (3) Persentase pekerja formal terhadap total pekerja; (4) Tingkat ketidaksesuaian (mismatch) pendidikan dan pekerjaan; (5) Jumlah penciptaan lapangan kerja baru per tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Deskripsi IKU

Definisi

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dihitung sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mencari kerja. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah/negara pada periode tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka mengukur seberapa besar persentase angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan adanya banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyediaan lapangan kerja suatu negara. Ketika pengangguran tidak bisa teratasi dengan baik tentunya lapangan kerja akan semakin minim karena adanya ketidakseimbangan antara kedua faktor tersebut. Tingginya tingkat pengangguran tentunya pasti akan mempengaruhi lapangan kerja dan menjadi pengganggu bagi tercapainya tujuan negara.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

Formula

Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Ssurvei Angkatan Kerja Nasional (Saker/98nas).

$$TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

<ul style="list-style-type: none"> Pengangguran Terbuka: orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha/kegiatan ekonomi, dan aktif tersedia untuk bekerja dalam periode survei Angkatan Kerja: semua orang usia kerja (≥15 tahun) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan (termasuk pengangguran terbuka) TPT: Persentase dari angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tetapi sedang aktif mencarinya.
Tujuan
Mengukur efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja serta menilai kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Tingkat Kendali IKU	<div> <div>(...) High</div> <div>(...) Moderate</div> <div>(X) Low</div> </div>
Tingkat Validitas IKU	<div> <div>(X) Exact</div> <div>(...) Proxy</div> <div>(....) Activity</div> </div>
Jenis Konsolidasi Periode	<div> <div>(...) Sum</div> <div>(....) Average</div> <div>(X) Take Last Known Value</div> </div>
Jenis Cascading IKU	<div> <div>(X) Cascading Peta</div> <div>(.....) Cascading Non Peta</div> <div>(...) Non-Cascading</div> </div>
Metode Cascading	<div> <div>(X) Direct</div> <div>(...) Indirect</div> </div>
Polarisasi IKU	<div> <div>(...) Maximize</div> <div>(....) Minimize</div> <div>(X) Stabilize</div> </div>
Periode Pelaporan	<div> <div>(....) Bulanan</div> <div>(...) Triwulanan</div> <div>(....) Semesteran</div> <div>(X) Tahunan</div> </div>

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	4,5% - 5%	4,5% - 5%
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 4.1

Perspektif : (...) Stakeholder (...) Customer (X) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : SS 4. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Peraturan Presiden Nomor 143 tahun 2024 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan proses sinkronisasi, koordinasi serta pengendalian di bidang Perekonomian. Keberhasilan dalam mewujudkan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif akan mendorong tercapainya target-target ekonomi makro yang ditargetkan. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas adalah kondisi di mana perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dilakukan secara terencana, berbasis data dan analisis yang kuat, serta mampu menjawab dinamika dan tantangan ekonomi secara tepat dan adaptif. Kebijakan yang berkualitas ditandai dengan konsistensi antar sektor, responsif terhadap perubahan global dan domestik, serta memiliki efek nyata terhadap peningkatan stabilitas, pertumbuhan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini menggambarkan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional dan sektoral dilakukan secara terintegrasi, berbasis data dan analisis mendalam, serta menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi yang berkualitas bukan hanya memenuhi standar administratif atau formalitas regulasi, tetapi juga memperhatikan aspek substansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, kesinambungan, serta konsistensi antarsektor dan antarwaktu. Kebijakan ini juga mampu merespons dinamika ekonomi domestik maupun global, termasuk perubahan teknologi, krisis keuangan, dan tantangan iklim.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Deskripsi IKU

Definisi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam pelaksanaannya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Menteri yang bertanggung jawab atas Indeks Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi Pengendalian adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

1. Kebijakan terkait Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Kebijakan terkait Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Kebijakan terkait Penyelesaian Penugasan Pemerintah
4. Kebijakan terkait Tingkat Inflasi
5. Kebijakan terkait Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital
6. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Bilateral
7. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Regional
8. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral
9. Kebijakan terkait Kerja Sama Investasi dan Hilirisasi
10. Kebijakan terkait Ekonomi Makro dan Fiskal
11. Kebijakan terkait Digital Economy Framework Agreement
12. Kebijakan terkait Program Belanja Masyarakat
13. Kebijakan terkait Pengendalian Impor
14. Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara, dan Rel
15. Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
16. Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
17. Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
18. Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
19. Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
20. Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
21. Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Geologi Nasional
22. Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
23. Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel
24. Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
25. Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
26. Kebijakan terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara

		<p>27. Kebijakan terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis</p> <p>28. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka</p> <p>29. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil</p> <p>30. Kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan</p> <p>31. Kebijakan terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis</p> <p>32. Kebijakan terkait Pengembangan Pariwisata</p> <p>Adapun Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal bussiness</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Tahapan 1. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait kebijakan perekonomian dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Identifikasi dan Penetapan ruang lingkup yang diselesaikan 2. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy Brief 3. Telaah staf tentang urgensi penanganan isu <p>Tahapan 2. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan alternatif rekomendasi yang berisikan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy brief 2. Telaah staf tentang kebijakan yang diambil <p>Tahapan 3. Pada Tahapan ini dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti penyelenggaraan rapat koordinasi berupa Notula, surat deputi 2. Rancangan kebijakan seperti: RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko dan RPermen <p>Tahapan 4. Pada tahapan ini evaluasi dan monitoring kebijakan dilakukan terhadap rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan monitoring dan evaluasi kebijakan 2. Laporan hasil evaluasi kebijakan 3. Dokumen/kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan
		<p>Formula</p> <p>Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:</p> $\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ D\ 1 \times SKP\ D\ 2 \times SKP\ D\ 3 \times SKP\ D\ 4 \times SKP\ D\ 5}$ <p>Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian.</p>
		<p>Tujuan</p> <p>Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target Indeks Ketahanan Energi, Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global, Tingkat Inflasi, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, Rasio PDB Pariwisata, Devisa Pariwisata, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio PDB Industri Pengolahan, Biaya Logistik, Pembentukan Modal Tetap Bruto</p>
	Satuan Pengukuran	Indeks
	Unit/Pihak Penyedia Data	Seluruh Eselon I Kedeputan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Pejabat Penanggung Jawab Data	Seluruh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Sumber Data	BPS, BI, Kementerian terkait
	Tingkat Kendali IKU	<div>(...) High</div> <div>(X) Moderate</div> <div>(....) Low</div>
	Tingkat Validitas IKU	<div>(X) Exact</div> <div>(...) Moderate</div> <div>(....) Low</div>
	Jenis Konsolidasi Periode	<div>(...) Sum</div> <div>(....) Average</div> <div>(X) Take Last Known Value</div>

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan I	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan II	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan III	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan IV	3 dari 4 (Baik)	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 5.1

Perspektif	:	(...) Stakeholder (X) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang berkualitas merupakan sasaran strategis yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> <p>Formula</p> <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$ <p>Tujuan</p> <p>Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>
Satuan Pengukuran	:	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	:	Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian
Tingkat Kendali IKU	:	(X) High (...) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(...) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan

:

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan I	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan II	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan III	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan IV	3 dari 4 (Baik)	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 6.1

Perspektif	:	() Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (X) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	:	<div><p>Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemenko Perekonomian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, melalui penerapan prinsip-prinsip good governance, penguatan sistem manajemen, serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang profesional dan integratif, sehingga mampu mendorong koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional secara optimal. Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk menjalankan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional secara efisien, akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional. ata kelola yang berkualitas berarti bahwa seluruh proses manajemen internal di Kemenko Perekonomian, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, dilaksanakan dengan:</p><div><div>1. Efektivitas kelembagaan, yaitu fungsi koordinasi antar kementerian/lembaga berjalan optimal.</div><div>2. Akuntabilitas kinerja, didasarkan pada indikator yang terukur dan hasil yang nyata.</div><div>3. Transparansi dan integritas, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.</div><div>4. Adaptabilitas organisasi, dalam merespons perubahan lingkungan strategis ekonomi nasional dan global, termasuk disrupsi teknologi, krisis ekonomi, dan tantangan pembangunan berkelanjutan.</div></div><p>Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk memperkuat peran Kemenko Perekonomian sebagai penggerak utama sinergi lintas sektor dalam kebijakan ekonomi, dengan tata kelola birokrasi yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis kebijakan yang kuat; peningkatan kualitas layanan dukungan kebijakan kepada kementerian/lembaga teknis; pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis pemerintahan yang transparan dan efisien; perbaikan sistem manajemen kinerja, SDM, dan pengelolaan keuangan negara; dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip <i>good governance</i> dan reformasi birokrasi</p></div>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.6.1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik
Deskripsi IKU	:	<div><div>Definisi</div><p>Reformasi Birokrasi merupakan proses perubahan dan pembaruan yang dilakukan dalam sistem dan struktur pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya menyederhanakan proses bisnis dan menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat kinerja pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.</p><p>Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat maupun daerah) telah berhasil menerapkan prinsip dan program reformasi birokrasi. Indeks ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari Komponen RB General (60%) dan Komponen RB Tematik (40%), penilaian ini didasarkan kepada pedoman terbaru dari Kementerian PANRB (Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024). Indeks RB dikategorikan dalam nilai sekaligus predikat tertentu.</p><div><div>• Nilai >90 – 100 Kategori AA memiliki predikat Istimewa</div><div>• Nilai >80 – 90 Kategori A memiliki predikat Sangat Baik</div><div>• Nilai >70 – 80 Kategori BB memiliki predikat Baik</div><div>• Nilai >60 – 70 Kategori B memiliki predikat Cukup Baik</div><div>• Nilai >50 – 60 Kategori CC memiliki predikat Cukup</div><div>• Nilai >30 – 50 Kategori C memiliki predikat Buruk</div><div>• Nilai >0 – 30 Kategori D memiliki predikat Sangat Buruk</div></div><p>Penilaian Indeks Refromasi Birokrasi dilakukan oleh evaluator yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya.</p></div> <div><div>Formula</div><p>Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang tertuang didalam Kementerian PANRB (Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024) .</p><div><div>Indeks RB = (Nilai RB General × 60%) + (Nilai RB Tematik × 40%)</div></div></div>

<ul style="list-style-type: none"> Komponen RB General mewakili 60% dari total nilai dan menilai 10 area perubahan yang menjadi inti pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, penguatan pengawasan, dan kualitas layanan publik. Nilai ini menunjukkan bagaimana instansi melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. RB Tematik menyumbang 40% dari nilai akhir dan berfokus pada kontribusi instansi terhadap agenda nasional seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, dan transformasi digital. Penilaian ini memastikan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi internal, tetapi juga mendukung hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tujuan
Mengukur capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten, terarah, dan memberikan dampak nyata baik di tingkat internal pemerintahan maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian PAN RB
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Sumber Data	Kementerian PAN RB
Tingkat Kendali IKU	: (X) High (..) Moderate (..) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (..) Proxy (..) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(..) Sum (..) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (..) Cascading Non Peta (..) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (..) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (..) Minimize (..) Stabilize
Periode Pelaporan	: (..) Bulanan (..) Triwulanan (..) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	90,77	90,77
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-